UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PASAL 4 KEPMENAKERTRANS 232 TAHUN 2003 MENGENAI MAKNA KLAUSULA JALAN BUNTU DAN HAK MOGOK KERJA BAGI SERIKAT PEKERJA YANG MENYATAKAN JALAN BUNTU
Rany Angela Siahaan, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyhadie, Zaeni, 2009, *Peradilan Hubungan Industrial,* Rajawali Pers.

Chan Robles and Assocites Law Firm, 1996, *Primer On Strike, Picketing And Lockout*, ChanRobles Publishing Company, Manila.

Koeshartanto, D dan Junaedi, M.F. Shellyana, 2005, *Hubungan Industrial: Kajian konsep dan permasalahan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Djumadi, 1995, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Fariana, Andi, 2012, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan, Mitra Wacana Media*, Jakarta.

Djumialdi, F.X, 2010, *Perjanjian Kerja,* Sinar Grafika.

Kartasapoetra, G, 1992, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* PT.Bina Ilmu, Surabaya.

Hakim, Abdul 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Hernawan, Ari 2013, *Ketidakadilan dalam Norma dan Praktik Mogok Kerja di Indonesia*, Udayana University Press, Denpasar.

Husni, Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjan Indonesia*, edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2004, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persaa, Jakarta.

Kertonegoro, Sentanoe. 1999, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartid) dan Pemerintah (Tripatid)*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.

Khakim, Abdul, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, edisi revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kustandi, Abas, 1983, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan kerja*, Armico, Bandung.

Maimun, 2003 , *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud 2004, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PASAL 4 KEPMENAKERTRANS 232 TAHUN 2003 MENGENAI MAKNA KLAUSULA JALAN BUNTU DAN HAK MOGOK KERJA BAGI SERIKAT PEKERJA YANG MENYATAKAN JALAN BUNTU
Rany Angela Siahaan, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Muhammad, Abdulkadir, 1981, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Muharam, Hidayat, 2006, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanannya di Indonesia*, Citra Adutya Bakti, Bandung.

ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nasir, Muhammad, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.

Pujio, dan Ugo, 2011, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tata Cara, dan Proses Penyeleseaian Sengketa Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rivero, Jean, Sur le droit au développement, UNESCO, UN Doc. 5578/Conf./630/Supp.2 (1978) (translated to English by the Texas International Law Journal).

Simamora, Henry 1999, *Manajemen SUmber Daya Manusia*, STIEK YKPN, Yogyakarta.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Persada, Jakarta.

Uwiyono, Aloysius, 2001, *Hak Mogok di Indonesia*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Yusuf, A.Muri, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif &amp*; Penelitian Gabungan, Kencana, Jakarta.

Wijayanti, Asri, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1050)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PASAL 4 KEPMENAKERTRANS 232 TAHUN 2003 MENGENAI MAKNA KLAUSULA JALAN BUNTU DAN HAK MOGOK KERJA BAGI SERIKAT PEKERJA YANG MENYATAKAN JALAN BUNTU
Rany Angela Siahaan, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Nomor 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah;

Executive Order No. 111 December 24, 1986 Amending Certain Provisions Of The Labor Code Of The Philippines, As Amended;

Labor Code of the Philippines Presidential Decree No. 442, as Amended a Decree Instituting a Labor Code thereby Revising and Consolidating Labor and Social Laws to Afford Protection to Labor, Promote Employment and Human Resources Development and Insure Industrial Peace Based on Social Justice;

Trade Union Act 1959 (Act 262), Part IV "Rights and Liabilities Of Trade Unions ".

Putusan

Putusan Penyelesaian Perselihan Hubungan Industrial Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, PT Adyawinsa Stamping Industries, 7 Agustus 2015

Jurnal

Ankara, "Rethinking "*Third Generation" Human Rights*", Vol:l, No:l, 2004

Cornescu, Adrian Vaile"The Generations Of Human's Rights", Brno: Masaryk University, 1. edition., 2009

Farianto, Willy, "Hak Mogok Kerja dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis", *IUS QUIA IUSTUM* Vol.21, No. 4, Oktober 2014.

García, Jorge Andrés Leyton "The Right to Strike as a Fundamental Human Right: Recognition and Limitations in International Law", *Pontificia Universidad Católica de Chile*, vol. 44, núm. 3, 2017

Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,* Vol 5, No.3, Maret, 2006.

Nugroho, M. Adzkar Arifian *et al*, "Jaminan Hukum Mogok Kerja Di Indonesia", *UNS Surakarta,* Vol. 08 No. 02 Agustus 2014.

Sipahutar, Chairina Nopiyanti. Et al "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Melaksanakan Hak Mogok Di Indonesia", USU Law Journal, Vol. 5, No.4, Oktober 2017.

Hasil Penelitian

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PASAL 4 KEPMENAKERTRANS 232 TAHUN 2003 MENGENAI MAKNA KLAUSULA JALAN BUNTU DAN HAK MOGOK KERJA BAGI SERIKAT PEKERJA YANG MENYATAKAN JALAN BUNTU
Rany Angela Siahaan, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Amany, Nailul, 2015, *Tinjauan Tentang Mogok Kerja yang Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hernawan, Ari, 2004, *Perlindungan Hukum bagi pekerja yang Melakukan Pemogokan di Perusahaan Swasta Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

International Labour Organization, 2002, Prinsip-Prinsip ILO tentang hak Mogok, Kantor Perburuhan International, Jakarta.

Pramumijoyo, Pranindyasa, 2016, *Perlindungan Hukum bagi pengurus serikat pekerja yang melakukan mogok kerja di PT PRAVIANTY VANTASIA*, Tesis, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Internet

Ady, Tren Mogok Kerja Mengalami Penurunan "*https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51e616d468e1c/tren-mogok-kerja-mengalami-penurunan*" diakses tanggal 6 Mei 2019.

Buruh Online, 2018, "Mogok Kerja Tidak Sah, MA Kembali Tegaskan Harus Adanya Risalah Perundingan", https://buruh-online.com/2018/11/mogok-kerja-tidak-sah-ma-kembali-tegaskan-harus-adanya-risalah-perundingan.html, diakses 15 Mei 2019

Buruh Online, 2015, "Jelang Hari Buruh, Kemnaker Diminta Revisi Aturan Mogok Kerja" https://buruh-online.com/2016/04/jelang-hari-buruh-kemnaker-diminta-revisi-aturan-mogok-kerja.html, dikases 16 Mei 2019

Buruh Online, 2015, "PHI Bandung Tegaskan Syarat Mogok Adalah Risalah Gagalnya Perundingan" https://buruh-online.com/2015/10/phi-bandung-tegaskan-syarat-mogok-adalah-risalah-gagalnya-perundingan.html, diakses 16 Mei 2019

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, diunduh* dari http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi, pada tanggal 19 Februari 2019.

Gajimu.com, "Ketentuan dan aturan Mogok Kerja", *https://gajimu.com/tips-karir/ketentuan-dan-aturan-mogok-kerja*, diakses 5 Mei 2019.

Giri Hartomo, "Karyawan boleh melakukan aksi mogok kerja, asal.", *https://economy.okezone.com/read/2017/08/23/320/1761771/karyawan-boleh-melakukan-aksi-mogok-kerja*-asal diakses tanggal 8 Mei 2019.

Pramesti, Tri Jata Ayu Kualifikasi Mangkir dan Pengunduran Diri Secara Sukarela, "*https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b90c97771b30/kualifikasi-mangkir-dan-pengunduran-diri-secara-sukarela-/*", diakses tanggal 3 Juli 2019

Republic of the Phillippines Departement of labor and employement, "Strikes and Lockout", https://blr.dole.gov.ph/2014/12/11/strikes-and-lockout/, di akses 9 Mei 2019

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS PASAL 4 KEPMENAKERTRANS 232 TAHUN 2003 MENGENAI MAKNA KLAUSULA JALAN BUNTU DAN HAK MOGOK KERJA BAGI SERIKAT PEKERJA YANG MENYATAKAN JALAN BUNTU
Rany Angela Siahaan, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jambi Ekspress, "Hukuman Mati Dari Sudut Pandang Hakim", http://www.jambiekspres.co.id/read/2017/05/03/743/hukuman-mati-dari-sudut-pandang-hakim/, diakses tanggal, 16 Mei 2019

Sederet.com, "Cara membuat catatan rapat/notulen (*minutes of meeting*)", *https://www.sederet.com/tutorial/cara-membuat-catatan-rapat-notulen-minutes-of-meeting-dalam-bahasa-inggris/*, diakses 18 Juni 2019.

"Pengertian risalah", *http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-risalah/*, diakses 18 Juni 2019.

Hasil Wawancara

Reytman Aruan, *Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan*

Umar Kasim, *Konsultan Serikat Pekerja*